



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,



Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo disusun dalam rangka penyusunan LAK BPK guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi BPK dalam periode Tahun 2016. Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan *good and clean government* serta sebagai bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Perhatian pemilik kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum terhadap kinerja pemeriksaan BPK juga semakin meningkat. Kondisi ini kian menguatkan semangat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian visi BPK “Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”.

Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja yang ditandatangani Auditor Utama Keuangan Negara VI dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo merupakan pengejawantahan atas sasaran strategis BPK guna mewujudkan visi dan misi BPK.

Akhirnya dengan semangat integritas, independensi, dan profesionalisme untuk memberikan kontribusi terbaik, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya membangun kultur organisasi perwakilan yang lebih baik agar kepercayaan pemilik kepentingan terhadap kinerja BPK semakin meningkat.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI.

Gorontalo, Februari 2019
Kepala Perwakilan

Muhaimin S.H., M.Si.
NIP 196405191985031004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR LAMPIRAN	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	6
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	9
1. Sub Auditorat Gorontalo	10
2. Sekretariat Perwakilan	11
3. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa	11
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	11
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	11
2. Anggaran dan Realisasi	12
3. Sarana dan Prasarana	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	19
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	19
1. Visi.....	19
2. Misi	19
3. Tujuan Strategis	19
4. Sasaran Strategis	20
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO	30
A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	30
1. Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2018	30
2. Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2018 Dibandingkan dengan Capaian 4 Tahun Terakhir	32
3. Penjelasan atas Capaian IKU Tahun 2018	33
4. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2018 dengan Target Kerja 5 Tahun	47
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Secara Umum	50
B. Sebab-sebab Umum Perubahan Pencapaian Skor.....	50
C. Kendala/Hambatan dalam Pencapaian IKU Tahun 2018	51
D. Strategi dan Rencana Aksi dalam Pemenuhan Target Tahun 2019	52

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	28
Tabel 2	Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	31
Tabel 3	Percapaian Capaian IKU Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Empat Tahun Terakhir	33
Tabel 4	Perbandingan Capaian IK Tahun 2018 dengan Target Kerja 5 Tahun	48
Tabel 5	Alokasi Anggaran Dalam Rangka Mencapai Indikator Kinerja yang Diharapkan	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	9
Gambar 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	13
Gambar 3 Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	14
Gambar 4 Rumah Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo	14
Gambar 5 Rumah Jabatan Struktural Eselon III	15
Gambar 6 Rumah Jabatan Struktural Eselon IV	16
Gambar 7 Musholla BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	16
Gambar 8 Kendaraan Dinas Kepala Perwakilan	17
Gambar 9 Kendaraan Dinas Operasional Perwakilan	18
Gambar 10 Motor Dinas Operasional Perwakilan	18
Gambar 11 Peta Strategi Auditorat Keuangan Negara VI	25
Gambar 12 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	26
Gambar 13 Pemaparan Di Hadapan AUI oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Dikoordinir oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	35
Gambar 14 Kegiatan <i>Media Workshop</i> Perwakilan Tahun 2018	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Masa Kerja Pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Lampiran 2	Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per Semester II Tahun 2018
Lampiran 3	Tingkat Implementasi Strategi Periode Tahun 2018
Lampiran 4	Tingkat Evaluasi LHP Periode Tahun 2018

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Bagian Keenam Pelaporan Kinerja Pasal 18 (1) yang menetapkan antara lain bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/K/I-VIII.3/7/2007

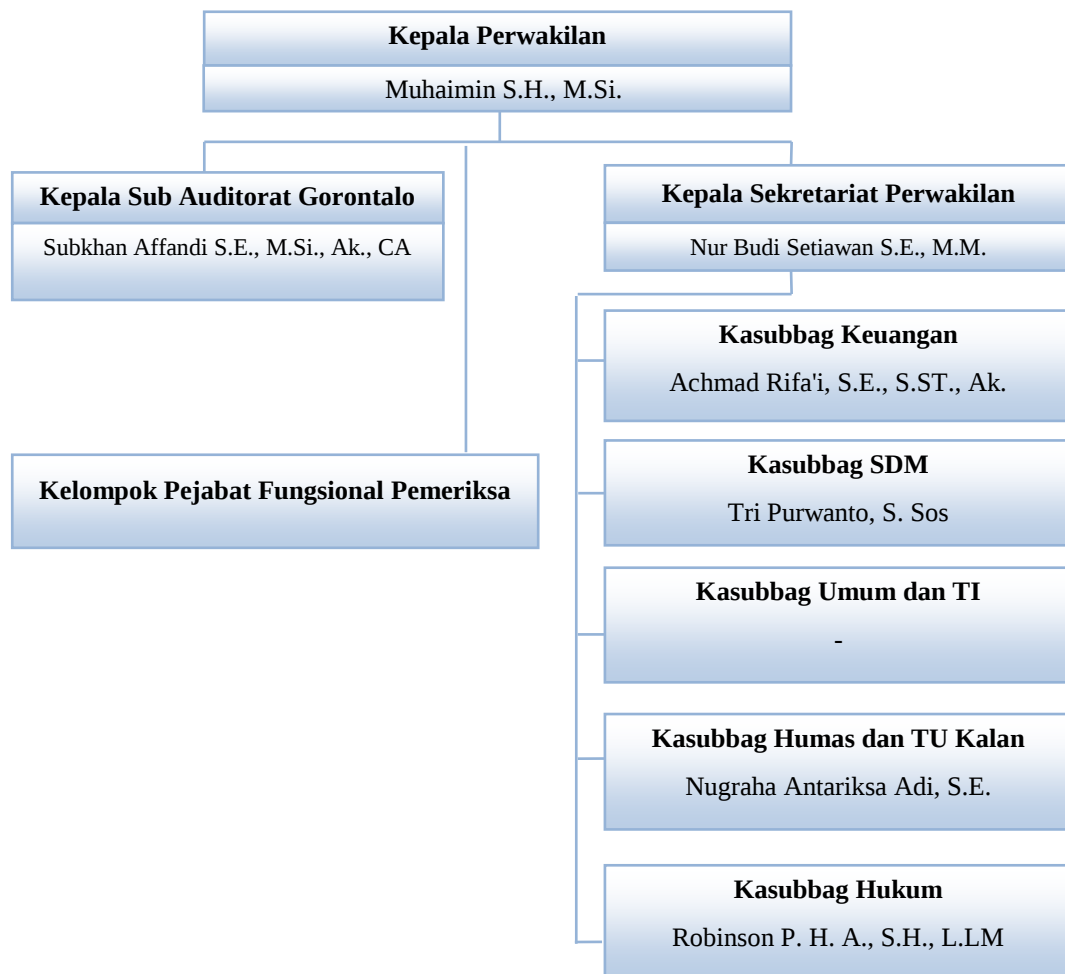
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Bagian Kedelapan Pasal 981 ayat 1 dan Nomor : 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 pada Pasal 713 menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada dibawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI melalui Tortama Keuangan Negara VI, dan Pasal 714 menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 diatas, sesuai Pasal 715 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;

9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pengkompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
13. Penyiapan bahan perumusan bahan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan ;
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai 8 struktural yang terdiri atas Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian SDM, Kepala Sub Bagian Umum dan TI, Kepala Bagian Humas dan TU Kalan, dan Kepala Sub Bagian Hukum, namun pada akhir tahun 2018 posisi Kepala Sub Bagian Umum dan TI sedang kosong karena pejabat sebelumnya Bapak Guritno Pranoto S.Sos telah memasuki masa pensiun.

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah unsur pelaksana BPK. Tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas:

1. Sub Auditorat Gorontalo

Sub Auditorat Gorontalo mempunyai tugas:

- a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) Merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) Mengevaluasi hasil kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

2. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

3. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki SDM per 31 Desember 2018 sebanyak 71 orang terdiri atas 51 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 Tenaga Tidak Tetap. Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 7 pejabat struktural yaitu Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian SDM, dan Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, 27 orang pemeriksa, dan 16 orang penunjang. Selain PNS tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo didukung oleh tenaga tidak tetap berjumlah 21 orang yang terdiri atas 1 orang tenaga administrasi, 13 orang satuan pengamanan (Satpam), 3 orang pengemudi, dan 2 orang tenaga medis yaitu dokter dan perawat, 1 orang tenaga teknis, serta 1 orang penerima tamu.

Adapun ditinjau dari masa kerja pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dimuat pada **Lampiran 1**, dari lampiran tersebut dapat dilihat bahwa masa kerja pegawai dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Masa kerja 4 tahun keatas sebanyak 10 orang
- b. Masa kerja 3 s.d. 4 tahun sebanyak 9 orang
- c. Masa kerja 3 tahun kebawah sebanyak 31 orang

2. ANGGARAN DAN REALISASI

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2018 memperoleh anggaran sebesar Rp15.322.784.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.493.508.536,00 atau 94,58 % dari anggaran. Anggaran dan realisasi tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran dan realisasi Tahun 2017 yakni anggaran sebesar Rp17.457.004.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.587.244.258,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

3. SARANA DAN PRASARANA

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai sebagai berikut.

a. Tanah

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki tiga bidang tanah pada lokasi berbeda yaitu :

- 1) Seluas 3.485 m² di Jln. Piola Isa diperoleh pada Tahun 2012 digunakan untuk Mess Pegawai serta Rumah Jabatan Eselon IV s.d. Eselon II.
- 2) Seluas 5.931 m² di Jln. Tinaloga No. 3 diperoleh pada Tahun 2009 digunakan untuk gedung kantor, poliklinik, ruang olah raga, dan gudang.
- 3) Selain itu tanah seluas 6.450 m² di Jln. Tinaloga No. 3 diperoleh Tahun 2016, tanah tersebut masih kosong dan direncanakan akan digunakan untuk Rumah Dinas Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta fasilitas lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Dengan demikian tanah di Jln. Tinaloga No. 3 seluruhnya menjadi seluas 12.381m².

b. Gedung Kantor

Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terletak di Jln. Tinaloga Nomor 3, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, mulai ditempati pada awal Tahun 2011. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo, Sebelah Timur/bagian depan kantor berbatasan dengan Jln. Tinaloga/Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, sedangkan sebelah Selatan dengan Kantor Pengadilan Tinggi dan Barat berbatasan dengan areal persawahan. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki tiga lantai, dengan luas bangunan masing-masing lantai yaitu.

- 1) Lantai pertama seluas 926 m².
- 2) Lantai dua seluas 1.352 m².
- 3) Lantai tiga seluas 838 m².



Gambar 2. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

c. Mess Pegawai

Dalam memenuhi kebutuhan prasarana pegawai dan pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, pada Tahun 2012 dibangun Mess dua lantai, dengan luas masing-masing lantai kurang lebih 325 m². Fasilitas Mess terdiri atas 19 kamar tidur yang

dilengkapi dengan toilet pada masing-masing kamar, dapur, ruang makan, lobby, dan ruang pengelola.



Gambar 3. Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

d. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, pada Tahun 2013 mulai dibangun Rumah Jabatan Kepala Perwakilan, rumah jabatan tersebut terdiri atas dua lantai dengan luas masing-masing kurang lebih 200 m². Fasilitas Rumah Jabatan Kepala Perwakilan terdiri atas 2 kamar tidur utama, 2 kamar tidur tamu, 2 kamar tidur pembantu, dapur, ruang tamu, ruang makan keluarga, dan garasi.



Gambar 4. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo

e. Rumah Jabatan Struktural Eselon III dan IV

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2017 memiliki 7 unit rumah jabatan struktural yang terdiri atas rumah jabatan struktural eselon III sebanyak 2 unit dan struktural eselon IV sebanyak 5 unit. Rumah jabatan tersebut dibangun pada Tahun 2015, seluruh rumah jabatan telah dihuni sejak Tahun 2016.



Gambar 5. Rumah Jabatan Struktural Eselon III



Gambar 6. Rumah Jabatan Struktural Eselon IV

f. Fasilitas Ibadah

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki Musholla seluas 40 m² yang diberi nama Al Muhajirin yang dibangun pada Tahun 2016, Musholla tersebut terletak disebelah barat gedung kantor atau disamping garasi mobil.



Gambar 7. Musholla BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

g. Kendaraan dan Peralatan Penunjang Operasional

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki kendaraan roda empat sebanyak 7 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 9 unit, 60 PC, 85 Notebook, 63 unit Printer, 34 unit kalkulator, 10 unit mesin foto copy, dan 8 unit LCD projector, 45 scanner, dan 1 unit lift.



Gambar 8. Kendaraan Dinas Kepala Perwakilan



Gambar 9. Kendaraan Dinas Operasional Perwakilan



Gambar 10. Motor Dinas Operasional Perwakilan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 399/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, yang memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis.

1. Visi

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”.

Visi ini berarti bahwa sesuai dengan mandat yang tertuang dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK periode 2016-2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJM 2015-2019. Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

2. Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

3. Tujuan Strategis

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut.

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Manfaat hasil pemeriksaan diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak terjadi kecurangan (*fraud*) yang merugikan keuangan daerah dan mengandung unsur pidana. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah mendalam dan pilihan masa depan.

Meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan. Untuk itu maka pemeriksaan BPK harus relevan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Memastikan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara telah dilakukan sesuai standar pemeriksaan dan memenuhi sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan dan kelembagaan.

4. Sasaran Strategis

Tujuan strategis diatas dicapai melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi yang bermuara pada terwujudnya tujuh sasaran strategis pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang ingin dicapai pada periode 2016-2020 yakni.

a. ***Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan (SS1)***

Melalui sasaran strategis ini, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam perannya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara berupaya dengan cara melakukan kegiatan pemantauan data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan secara semesteran, melakukan survei atas indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja pemeriksa BPK yang dilaksanakan setiap tim melaksanakan kegiatan pemeriksaan, memenuhi permintaan penghitungan kerugian negara, memenuhi permintaan pemberian keterangan ahli. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan usulan bahan pendapat kepada Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (Dit. EPP). Usulan bahan pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola dibidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah.

Kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam memeriksa pengelolaan keuangan daerah memungkinkan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki data dan informasi keuangan daerah yang diperlukan dalam memberikan usulan bahan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan (SS2)

Kegiatan manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berusaha membuat perencanaan sesuai dengan kebijakan strategis pemeriksaan BPK Pusat, melakukan pemeriksaan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemeriksaan, memenuhi rasio pemeriksaan kinerja atas pemeriksaan yang dilaksanakan secara keseluruhan, dan berusaha menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan (SS3)

BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan SS3 ini. Meningkatkan kualitas pemeriksaan penting dilakukan sehingga hasil pemeriksaan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan, meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait.

Melalui strategi ini, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan upaya dengan melaksanakan *Quality Control (QC)* dan *quality assurance (QA)* Pemeriksaan, selain itu berupaya untuk menjaga konsistensi dan akurasi penyajian LHP.

d. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara (SS4)

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui SS ini berupaya melakukan peningkatan pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan cara antara lain berkoordinasi dengan pihak inspektorat daerah. Selain itu dalam melaksanakan SS ini BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan pemantauan kerugian negara.

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah diseluruh instansi pemerintah daerah dan BUMD di wilayah Provinsi Gorontalo.

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan berupaya untuk dapat menyajikan database status penyelesaian ganti kerugian daerah yang lengkap, akurat dan tepat waktu disampaikan ke Ditama Revbang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manajemen dan menjamin pelaksanaan pembayaran ganti

kerugian daerah. Disamping itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin memastikan proses penetapan kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara, pegawai BUMD dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

e. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan (SS5)

Untuk peningkatan kualitas organisasi di lingkungan perwakilan, sampai dengan Tahun 2017 BPK melaksanakan beberapa upaya antara lain penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dapat diukur sesuai dengan peraturan dan disampaikan secara berjenjang tepat waktu, peningkatan pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada setiap proses bisnis yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, penyampaian laporan bulanan yang berisi kegiatan, anggaran, dan realisasi secara tepat waktu. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupaya menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan media melalui kegiatan media relation. Selanjutnya kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tugas dan fungsi di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam PKPK 2018 menetapkan target IKU Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sebesar 92%.

f. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan (SS6)

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting BPK. Pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai menjadi prioritas untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas.

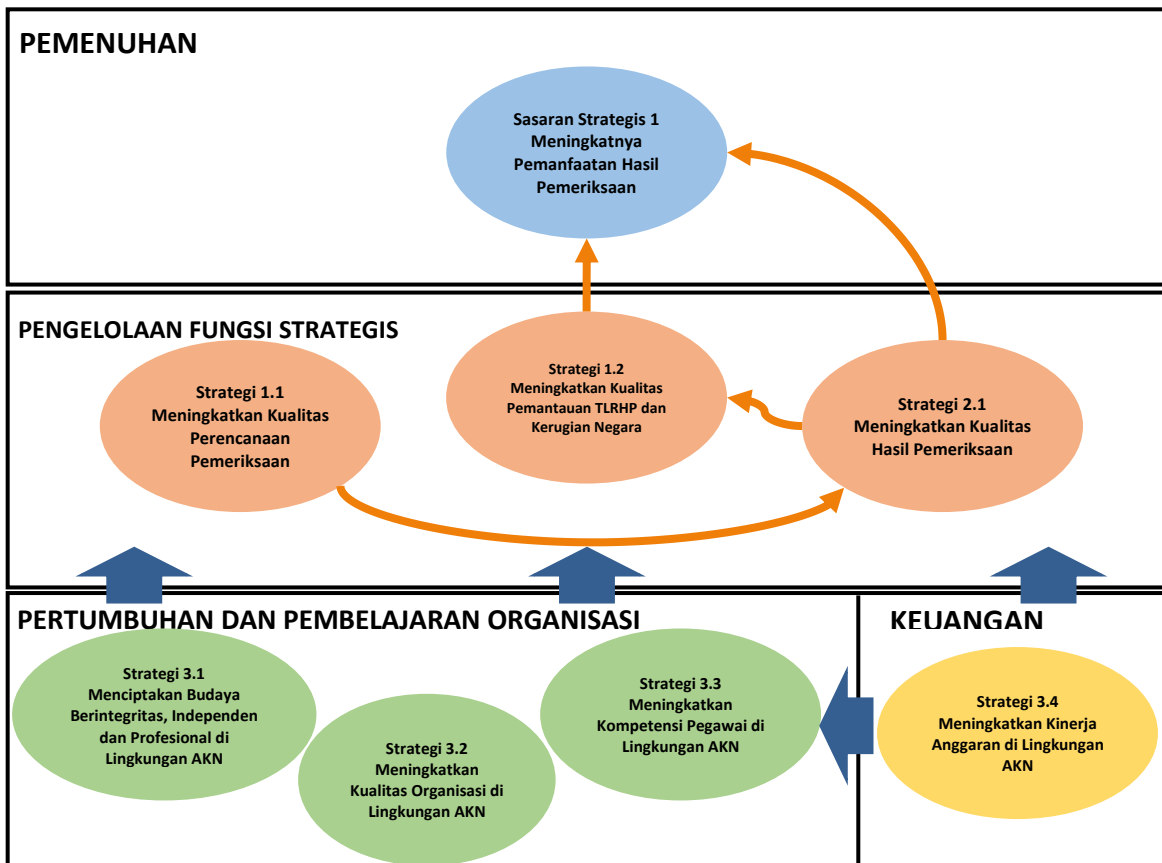
Melalui SS ini, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memberi kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, selain itu mewajibkan para pemeriksa untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang sebelumnya berkoordinasi dengan Pusdiklat BPK.

g. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan (SS7)

Sebagai pengguna anggaran negara, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada kinerja anggaran. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam PKPK 2018 menetapkan target IKU Kinerja Implementasi Anggaran sebesar 85%.

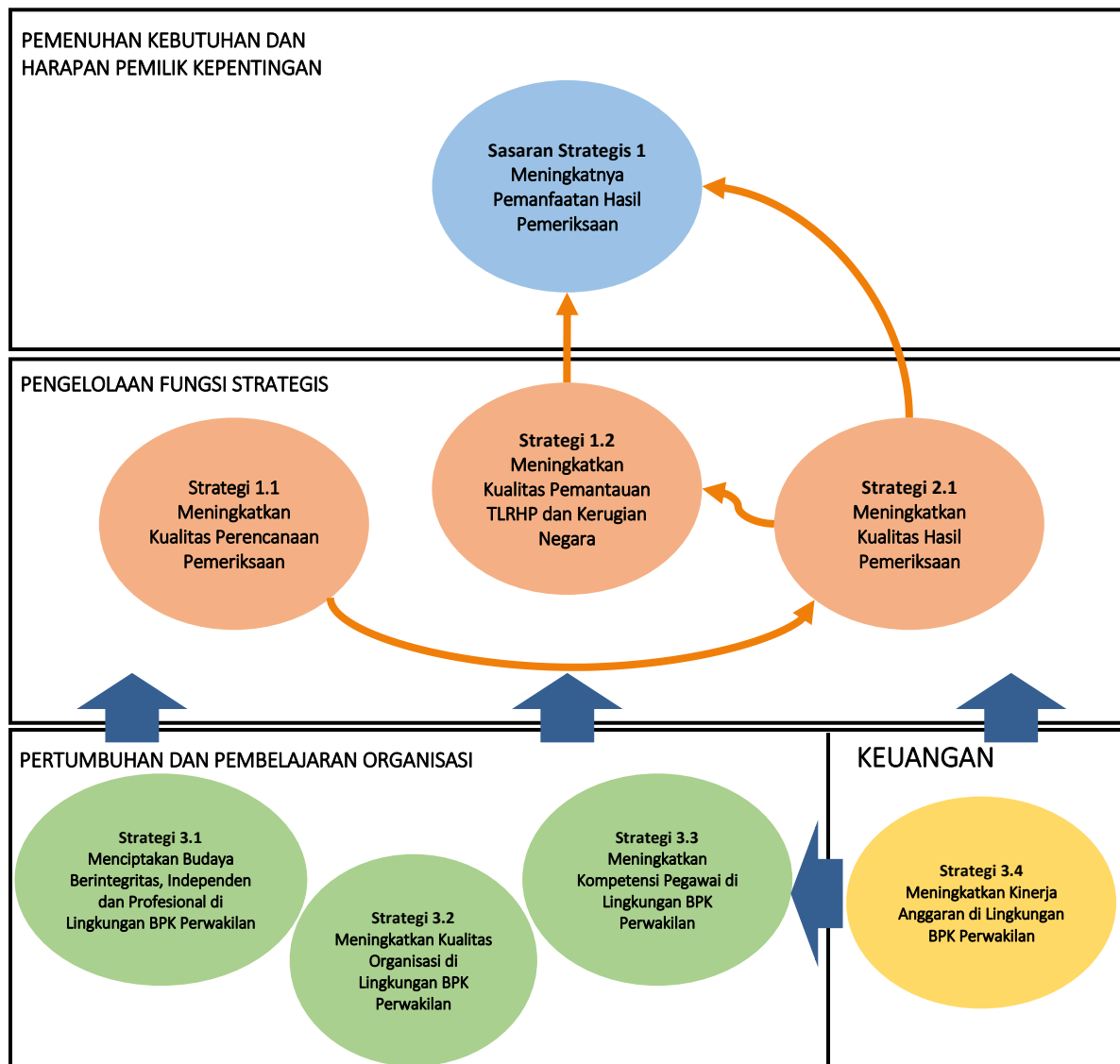
Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai kepanjangan BPK untuk wilayah timur menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai Tahun 2018. Keterkaitan tugas dan fungsi AKN VI dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis AKN VI berikut ini.



Gambar 11. Peta Strategi Auditorat Keuangan Negara VI

Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 399/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selaku satuan kerja pelaksana BPK menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018 yang kemudian dijabarkan dalam sistem penganggaran (RKP/RKSP) BPK. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK

Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berikut.



Gambar 12. Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU Tahun 2018. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Tortama KN VI dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo selaku Eselon II di Jakarta pada 23 April 2018. Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2018 dimuat pada tabel berikut.

No.		Sasaran Strategis	Target PKPK 2018
		Indikator Kinerja	
(1)		(2)	(3)
	Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	
1	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
2	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
3	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
4	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
	Strategi 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	
5	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
6	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	28%
7	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%
	Strategi 1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	
8	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
9	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	14
10	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
	Strategi 2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	
11	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
12	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10
13	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
14	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
	Strategi 3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	
15	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00
16	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00
17	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
	Strategi 3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	
18	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A

No.		Sasaran Strategis	Target PKPK 2018
		Indikator Kinerja	
(1)		(2)	(3)
19	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
20	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
21	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
22	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%
23	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%
24	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
	Strategi 3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	
25	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
26	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
	Strategi 3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo	
27	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menargetkan pencapaian atas 27 Indikator Kinerja, yang terdiri atas 4 Indikator Kerja Utama (IKU) dan 23 Indikator Kinerja (IK). Adapun Indikator Kinerja yang menjadi target pencapaian sebagai berikut.

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
2. IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH
3. IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
4. IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
5. IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
6. IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
7. IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP
8. IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
9. IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
10. IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
11. IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan
12. IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK
13. IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
14. IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

15. IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK
16. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
17. IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
18. IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
19. IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
20. IK 3.2.3 Jumlah *Best Practice* yang Disusun
21. IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best Practice*
22. IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja
23. IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
24. IK 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan
25. IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
26. IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
27. IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

A. CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

1. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyusun Indikator Kinerja beserta target pencapaian kinerja Tahun 2018. Indikator Kinerja beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Tortama KN VI selaku Eselon I dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo selaku Eselon II di Jakarta pada 23 April 2018. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target dan realisasi Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2018 hasil evaluasi Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dimuat pada tabel berikut.

No.		Sasaran Strategis	Target PKPK 2018	Realisasi
		Indikator Kinerja		
(1)		(2)	(3)	(4)
	Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan		
1	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	57,26%
2	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%
3	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%
4	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1
	Strategi 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan		
5	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%
6	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	28%	28,57%
7	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%
	Strategi 1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara		

No.		Sasaran Strategis	Target PKPK 2018	Realisasi
		Indikator Kinerja		
(1)		(2)	(3)	(4)
8	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%
9	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	14	14
10	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%
	Strategi 2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan		
11	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%
12	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,85
13	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%
14	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%
	Strategi 3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan		
15	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	3,93
16	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,28
17	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%
	Strategi 3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan		
18	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB
19	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	79,10%
20	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1
21	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%
22	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%
23	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%	92,10%
24	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	3,9
	Strategi 3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan		
25	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	95,83%
26	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	75%
	Strategi 3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo		
27	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	80,38%

Tabel 2 Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

2. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO PADA TAHUN 2018 DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN 4 TAHUN TERAKHIR

Perbandingan pencapaian skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2018 dengan empat tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat pencapaian IKU yang mengalami kenaikan, penurunan, dan tetap. Rincian Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2017 dibandingkan dengan capaian 4 tahun terakhir dimuat pada tabel berikut.

No.		Sasaran Strategis	Target PKPK 2018	2018	2017	2016	2015	2014
		Indikator Kinerja						
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	57,26%	60,99%	47,73%	53,57%	42,95%
2	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	0,00%	50%	80%
3	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	101,00%	50%	80%
4	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	2	1
	Strategi 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
5	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
6	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	28%	28,57%	28,57%	42,86%	N/A	N/A
7	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Strategi 1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						
8	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100,00%	N/A	N/A
9	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	14	14	14	14	14	14
10	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
	Strategi 2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
11	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100,00%	100%	95,50%
12	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,85	4,59	4,22	N/A	N/A
13	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
14	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	Strategi 3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan						
15	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	3,93	N/A	N/A	N/A	N/A
16	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,28	N/A	N/A	N/A	N/A

No.		Sasaran Strategis	Target PKPK 2018	2018	2017	2016	2015	2014
		Indikator Kinerja						
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	Strategi 3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan						
18	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	A	A	N/A	N/A
19	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	79,10%	65,89%	89,16%	100%	100%
20	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
21	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
22	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100,00%	91,67%	N/A	N/A
23	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%	92,10%	92,40%	92,40%	92,40%	90,91%
24	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	3,9	2	2,6	1	1
	Strategi 3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan						
25	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	95,83%	86,96%	87,10%	57,14%	85,19%
26	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	75%	72,41%	55,56%	N/A	N/A
	Strategi 3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo						
27	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	80,38%	91,82	90,26%	93,86%	95,84%

Tabel 3 Pencapaian Capaian IKU Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Empat Tahun Terakhir

3. PENJELASAN ATAS CAPAIAN IKU TAHUN 2018

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa terdapat 8 Indikator Kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target pada tahun 2018 yakni IKU 1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IK 3.1.1. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK, IK 3.1.2. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, IK 3.2.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja, IK 3.2.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IK 3.3.1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, IK 3.3.2. Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa), dan IK 3.4.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran. Adapun penjelasan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut.

a. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

1) IKU 1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Dalam rangka peningkatan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan kegiatan pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pada TA 2018 dilaksanakan sebanyak 2 kali secara semesteran. Sampai dengan akhir TA 2018, jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2014 s.d. 2018 yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.312 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 2.293 rekomendasi atau sebesar 57,22%, capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 65%. Hal tersebut terjadi karena antara lain Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah belum optimal berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah/SOPD/BUMD terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta belum tumbuhnya kesadaran terkait pentingnya perbaikan penyelesaian TLRHP BPK di lingkungan Pemda. Untuk itu, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan semakin meningkatkan pemahaman Pemda tentang pentingnya penyelesaian TLRHP BPK melalui pertemuan dan surat dengan para Kepala Daerah dan instansi daerah terkait sebanyak 2 kali dalam setahun.

Adapun Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per Semester II Tahun 2018 dimuat pada **Lampiran 2**.

2) IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH

IKU 1.2 ini ditargetkan sebesar 100%, sedangkan pada Tahun 2018 tidak terdapat temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana sehingga tidak terdapat LHP yang disampaikan ke IPH. Hasil evaluasi Dit. PSMK, pencapaian IKU ini dinyatakan 100%.

3) IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menjalankan fungsi koordinasi dengan Auditorat Utama Investigasi (AUI) terkait permintaan perhitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli. Hasil evaluasi Dit. PSMK, IKU 1.3. telah tercapai 100%.



Gambar 13. Pemaparan Di Hadapan AUI oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Dikoordinir oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

4) IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan BPK dapat berupa perbaikan di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Selain itu BPK juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 telah menyampaikan dua usulan bahan pendapat ke Ditama Revbang d.h.i. Direktorat Evaluasi Pelaporan Pemeriksaan (Dit. EPP) sebanyak 2 usulan bertema: **“Tanggung Jawab Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang Lalai Dalam Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi”** sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 194/ND/XIX.GOR/08/2018 tgl 10 Agustus 2018 dan 217a/ND/XIX.GOR/08/2018 tgl 30 Agustus 2018 tentang Penyampaian Usulan Bahan Pendapat dengan tema **“Kedudukan Protokoler BPK Dalam Acara Resmi di Daerah Tidak Sesuai dengan Tata Kedudukan Lembaga Negara Dalam UUD 1945”**. Atas dua usulan tersebut, melalui Nota Dinas Dit. EPP Nomor 565/ND/XII.2/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penyampaian Tanggapan Atas Usulan Bahan Pendapat tertulis bahwa usulan bahan pendapat yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tentang tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian daerah yang lalai dalam memberhentikan PNS yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dapat menjadi capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2018. Dengan demikian, IKU 1.4 telah tercapai sesuai target yakni sebanyak 1 usulan.

b. Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

1) IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Pada Tahun 2018, IK 1.1.1 ditargetkan sebesar 90,00%. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melakukan implementasi strategi pemeriksaan sesuai tema, fokus dan TSAO yang direncanakan pada 14 pemeriksaan yang terdiri atas 7 pemeriksaan LKPD, 4 pemeriksaan kinerja dan 3 PDTT. Dengan demikian IK 1.1.1 telah tercapai melampaui target yang ditetapkan, yaitu mencapai 100%. Adapun formulir input Indikator Kinerja Tingkat Implementasi Strategi Periode Tahun 2018 dimuat pada **Lampiran 3**.

2) IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

LHP Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebanyak 4 LHP, seluruhnya merupakan LHP Kinerja Tematik Pusat, yaitu 2 LHP terkait Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan, 1 LHP terkait Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa dan 1 LHP terkait Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan JKN. 4 LHP Kinerja tersebut merupakan bagian dari keseluruhan LHP yang telah diterbitkan pada Tahun 2018 sebanyak 21 LHP, sehingga hasil validasi Dit. PSMK menunjukkan bahwa rasio jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP adalah sebesar 28,57%% sehingga berhasil mencapai target IK 1.1.2 sebesar 28%.

3) IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

Untuk Tahun 2018, IK 1.1.3 ditargetkan mencapai 80% dan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana dan menjalankan strategi pemeriksaan sehingga tema, fokus, obyek, AO dan hasilnya telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas capaian tersebut, hasil validasi Dit. PSMK menunjukkan bahwa tingkat evaluasi LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melampaui target yang diharapkan yaitu sebesar 100% dibanding target sebesar 80%. Adapun formulir input Indikator Kinerja Tingkat Evaluasi LHP Periode Tahun 2018 dimuat pada **Lampiran 4**.

c. Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

1) IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pada Tahun 2018 kegiatan pemutakhiran Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dilaksanakan secara berkelanjutan yang merupakan kegiatan dari Tahun 2016 sejalan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 30/SK/XIX.GOR/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Instruksi Kerja Pengelolaan Dokumentasi Pemeriksaan di Sub Auditorat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang merupakan bagian dari Proyek Perubahan yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Auditorat dalam rangka Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Dengan adanya Instruksi Kerja tersebut dan pembenahan dokumen yang dilakukan Sub Auditorat maka Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dapat tersedia secara mutakhir. Dengan demikian IK 1.2.1 dapat tercapai sesuai target sebesar 100%.

2) IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Selama Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada tujuh entitas. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan pada seluruh entitas di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebanyak 2 kali yakni pada semester I dan II TA 2018 dengan jumlah Laporan Hasil Pemantauan sebanyak 14 laporan. Hal ini telah sesuai dengan target sebanyak 14 laporan atau tercapai 100%.

3) IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Atas pelaksanaan pemantauan penyelesaian kerugian daerah seperti tersebut pada IK 1.2.2 telah diterbitkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah sebanyak 14 laporan. Laporan dimaksud telah disampaikan kepada seluruh entitas yakni Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato, serta disampaikan ke Ditama Revbang d.h.i. Dit. EPP secara tepat waktu. Dengan demikian IK 1.2.3 dapat tercapai sebesar 100%.

d. Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

1) IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan

BPK sebagai lembaga profesi dituntut untuk terus meningkatkan (1) kapasitas kelembagaan, (2) kompetensi pelaksananya sesuai perkembangan dunia pemeriksaan, dan (3) hasil pemeriksaan yang bebas dari kesalahan yang sejalan dengan kebutuhan pemilik kepentingan yang terus berubah. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupaya untuk melaksanakan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) secara konsisten dan berkesinambungan. Selama TA 2018, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melakukan *quality control* dan *quality assurance* atas pelaksanaan pemeriksaan LKPD sebesar 100%, dan pencapaian ini telah sesuai dengan target.

2) IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

Target indeks IK 2.1.2 pada Tahun 2018 sebesar 4,10. Hasil survei yang dilaksanakan pada *auditee* atas tim-tim pemeriksa selama Tahun 2018 menghasilkan skor sebesar 4,85 atau naik dari Tahun 2017 sebesar 4,59. Dengan demikian, IK ini dapat tercapai melampaui target.

3) IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 diserahkan melalui acara paripurna di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada tanggal 30 Mei 2018 oleh Kaditama Binbangkum, sedangkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Gorontalo diserahkan antara tanggal 28 Mei 2018 oleh Kepala Perwakilan, Bapak Muhaimin, S.H., M.Si. kepada para Ketua DPRD dan para Kepala Daerah. Dengan demikian penyampaian LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-provinsi Gorontalo dilaksanakan secara tepat waktu dan IK 2.1.3 dapat tercapai sesuai target sebesar 100%.

4) IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

IK ini ditargetkan sebesar 100 %, pada Tahun 2018 pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tidak terdapat LHP yang digugat, dan hasil evaluasi Dit. EPP pencapaian IK ini sebesar 100% atau dinyatakan tercapai.

e. Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

1) IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK

IK ini merupakan IK baru yang penilaiannya baru dimulai pada Tahun 2018. Seluruh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dikirimkan kuesioner yang tujuannya menilai sejauh mana pemahaman pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK. Penyebaran kuesioner dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen, dan hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar 3,93, lebih kecil dari target sebesar 5,00.

2) IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IK ini merupakan IK baru yang penilaiannya baru dimulai pada Tahun 2018. Seluruh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dikirimkan kuesioner yang tujuannya menilai sejauh implementasi nilai dasar BPK terhadap para pegawai. Penyebaran kuesioner dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen, dan hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar 4,28, lebih kecil dari target sebesar 5,00.

3) IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IK ini merupakan IK yang dinilai oleh Biro SDM terkait apakah ada pegawai yang belum mematuhi kode etik dan peraturan disiplin. Tahun 2018 IK ini ditargetkan sebesar 100% dan hasil evaluasi Biro SDM menunjukkan bahwa IK ini mencapai 100 % atau telah tercapai sesuai target.

f. Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

1) IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Perwakilan telah dievaluasi oleh Itama, hasil evaluasi Itama dimaksud memperoleh nilai BB sesuai dengan Nota Dinas Itama Nomor 270/ND/XI/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018. Dengan demikian IK 3.2.1 belum dapat tercapai sesuai dengan target yakni bernilai A.

2) IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi informasi yang andal, BPK ditunjang dengan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan dalam sistem jejaring teknologi informasi di BPK. Untuk mengakses informasi tersebut diperlukan adanya peralatan keras dan peralatan lunak di tiap satuan kerja, melalui IK 3.2.2 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berusaha meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

Selama TA 2018, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memanfaatkan seluruh aplikasi teknologi dan informasi (TI). Aplikasi TI yang telah dimanfaatkan tersebut adalah SiAP LK, SMP, SI RKSP, SIMAK, SABMN, SAI, RKAKL, Aplikasi Gaji, Aplikasi SPM, Website Perwakilan, Sistem Informasi Keuangan(SIK), SAKPA, SIKAD, dan MAKIN atau SISDM. Namun belum seluruh pegawai memanfaatkan TI dimaksud dengan berbagai alasan antara lain lemahnya jaringan terutama di daerah-daerah tempat para pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan. Hal tersebut mengakibatkan pencapaian IK 3.2.2 tidak dapat tercapai sesuai dengan target sebesar 80%, berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatan TI yang dilaksanakan oleh Biro Teknologi dan Informasi, IK ini baru mencapai 79,10%.

3) IK 3.2.3 Jumlah *Best Practice* yang Disusun

Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mengusulkan 1 *Best Practice* tentang “**Layanan Hukum Terpadu pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo**”. *Best Practice* ini telah divalidasi dan disetujui oleh Ditama Revbang melalui Kadit PSMK melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Nomor 878/ND/XII.1/12/2018 tgl 31 Desember 2018 sehingga IK ini dapat tercapai sesuai dengan target.

4) **IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best Practice***

Dari 2 pilihan *Best Practice* yang ditawarkan Direktorat PSMK, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memilih untuk menerapkan *Best Practice* “**Pemanfaatan Portal EPP Dalam Penyusunan IHPS dan Penyimpanan Arsip IHPS**” melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Nomor 284/ND/XIX.GOR/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018. Atas penerapan tersebut, hasil validasi Dit. PSMK menunjukkan bahwa IK ini telah tercapai sesuai dengan target yaitu sebesar 100%.

5) **IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 20 angka (3) menetapkan antara lain bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran Angka II.7.a. menetapkan antara lain bahwa setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, satuan kerja atau unit kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang untuk disampaikan kepada atasannya. LAK BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2017 disampaikan kepada Tortama KN VI sebagai atasan langsung berdasarkan Nota Dinas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Nomor 28/ND/XIX.GOR/01/2018 tanggal 31 Januari 2018. Untuk penyampaian Laporan Bulanan dan Laporan Triwulanan Tahun 2018 telah dilaksanakan secara tepat waktu yakni antara tanggal 6 sampai dengan 10 bulan berikutnya. Dengan demikian IK 3.2.5 dapat tercapai sesuai target sebesar 100% .

6) **IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka pencapaian kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Melalui sasaran strategis ini, BPK secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan BPK. Selain itu, BPK juga terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya.

Dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana sesuai Surat Keputusan Sekjen BPK No. 229/K/X-XIII.2/8/2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan BPK, pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mencapai 92,10%. Dengan demikian IK 3.2.6 ini dapat mencapai target yang ditetapkan dalam PKPK sebesar 91%.

7) IK 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan

BPK sebagai lembaga eksternal pemerintah yang melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan negara/daerah tidak bisa lepas dari entitas yang diperiksa dan media. Untuk mendukung sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selalu menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan pemerintah daerah dan media.

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan beberapa kegiatan, termasuk diantaranya kegiatan Media Workshop dengan tema **“Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Serta BPK dalam Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo”** yang dilaksanakan pada 12 Desember 2018 sehingga IK 3.2.7 dapat tercapai melampaui target yang ditetapkan.



Gambar 14. Kegiatan *Media Workshop* Perwakilan Tahun 2018

g. Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan

1) IKU 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting BPK. Oleh sebab itu, penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas.

Untuk menjaga mutu kualitas pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, para pemeriksa diwajibkan melaksanakan pendidikan serta pelatihan sesuai dengan jam pelajaran yang ditargetkan.

Untuk menjaga kompetensi dan keahlian pegawai, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama TA 2018 telah memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk melaksanakan pelatihan dengan rata-rata jam pelatihan per pegawai sebanyak 40 jam pelatihan. Pada IK 3.3.1 ini ditargetkan sebesar 100%, namun pencapaian IK 3.3.1 dimaksud baru tercapai sebesar 95,83%. Dengan demikian IK 3.3.1 ini tidak dapat tercapai sesuai dengan target.

2) IKU 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Selain kompetensi dan keahlian para pemeriksa yang perlu dijaga, para pegawai penunjangpun perlu menjaga dan meningkatkan kompetensinya antara lain dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pada Tahun 2018 IK 3.3.2 tercapai sebesar 75,00 % atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2017 sebesar 72,41%. Namun demikian, IK 3.3.2 ini tidak dapat tercapai sesuai target yaitu sebesar 100%. Hal tersebut terjadi karena kesibukan dan terbatasnya pegawai pada unit kerja penunjang sehingga para pegawai penunjang yang ada kurang memiliki waktu untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan selain juga melaksanakan tugas pemeriksaan.

h. Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo

1) IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

BPK sebagai pelaksana anggaran negara tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan untuk mencapai tujuan negara. Melalui IK ini BPK berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan dalam proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Disamping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK.

Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp15.322.784.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.493.508.536,00 atau 94,58 % dari anggaran. Anggaran dan realisasi tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran dan realisasi Tahun 2017 yakni anggaran sebesar Rp17.457.004.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.587.244.258,00. Hasil validasi Biro Keuangan menunjukkan pencapaian IK 3.4.1 ini tingkat kinerja implementasi anggarannya adalah sebesar 80,38%, lebih rendah dibandingkan dengan target dalam PKPK sebesar 85%.

4. PERBANDINGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2018 DENGAN TARGET KERJA 5 TAHUN

Perbandingan capaian IKU Tahun 2018 dengan Target Kerja 5 Tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Sasaran Strategis		Target Kinerja					Capaian Tahun 2018	% Realisasi 2018
	Indikator Kinerja		2014	2015	2016	2017	2018		
	Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan							
1	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	55%	60%	65%	65%	57,26%	88,09%
2	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	1	65%	100%	100%	100%	100%	100%
3	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
4	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1	1	100%
	Strategi 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan							
5	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
6	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	N/A	N/A	15%	33%	28%	28,57%	102%
7	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Strategi 1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
8	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
9	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	14	14	14	14	14	14	100%
10	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Strategi 2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
11	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	N/A	N/A	3,6	3,7	4,10	4,85	105%
13	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
	Strategi 3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan							
15	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	N/A	N/A	5,00	3,93	78,6%
16	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	N/A	N/A	5,00	4,28	85,6%
17	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
	Strategi 3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan							
18	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	N/A	N/A	A	A	A	BB	71,00%
19	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	80%	79,10%	98,86%
20	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	N/A	N/A	N/A	1	1	1	100%
21	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
22	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%
23	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	N/A	N/A	100%	91%	92%	92,10%	100%
24	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	1	1	2	2	2	3,9	105%
	Strategi 3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan							
25	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	90%	90%	100%	100%	100%	95,83%	95,83%

No.		Sasaran Strategis	Target Kinerja					Capaian Tahun 2018	% Realisasi 2018
		Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018		
26	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	N/A	N/A	100%	90%	100%	75%	75%
	Strategi 3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo							
27	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	95%	92%	90%	85%	85%	80,38%	94,56%

Tabel 4 Perbandingan Capaian IK Tahun 2018 dengan Target Kerja 5 Tahun

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 terdapat 5 Indikator Kinerja baru dan 3 IKU yang mengalami peningkatan target yaitu :

- IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan;
- IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP;
- IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK;
- IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
- IK 3.2.4 Tingkat Penerapan Best Practice;
- IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas kinerja pemeriksa BPK yang naik dari tahun sebelumnya yakni 3,7 menjadi 4,10 pada Tahun 2018.;
- IK 3.2.6. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang naik dari 91% menjadi 92% di Tahun 2018; dan
- IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) dari Tahun 2017 sebesar 90% menjadi 100 % pada Tahun 2018.

B. REALISASI ANGGARAN

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2018 memperoleh anggaran sebesar Rp15.322.784.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.493.508.536,00 atau 94,58 % dari anggaran. Anggaran dan realisasi tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran dan realisasi Tahun 2017 yakni anggaran sebesar Rp17.457.004.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.587.244.258,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program yakni Program Pemeriksaan Keuangan Negara, yang kemudian dialokasikan untuk mencapai Indikator Kinerja yang ditargetkan selama Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Strategi	Indikator Kinerja		Anggaran	Realisasi
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rp 520.878.000	Rp 492.687.865
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	Rp 473.525.000	Rp 447.897.629
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	Rp 688.827.000	Rp 651.547.395
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	Rp 3.252.000	Rp 3.076.000
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	Rp 809.866.000	Rp 766.035.714
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	Rp 1.811.474.000	Rp 1.713.436.271
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	Rp 746.402.000	Rp 706.006.412
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp 457.160.000	Rp 432.418.310
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp 474.499.000	Rp 448.818.916
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	Rp 316.333.000	Rp 299.212.926
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	Rp 1.549.941.000	Rp 1.466.057.546
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	Rp 618.924.000	Rp 585.427.575
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	Rp 555.779.000	Rp 525.700.009
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	Rp 558.799.000	Rp 528.556.565
Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	Rp 759.277.000	Rp 718.184.612
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Rp 692.123.000	Rp 654.665.014
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	Rp 347.042.000	Rp 328.259.942
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	Rp 557.816.000	Rp 527.626.765
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Rp 601.558.000	Rp 569.001.430
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	Rp 427.627.000	Rp 404.483.648
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	Rp 387.335.000	Rp 366.372.268
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	Rp 260.381.000	Rp 246.289.072
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Rp 410.523.000	Rp 388.305.324
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	Rp 249.988.000	Rp 236.458.545
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	Rp 624.969.000	Rp 591.145.417
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	Rp 278.810.000	Rp 263.720.686
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Rp 139.676.000	Rp 132.116.677
Total			Rp 15.322.784.000	Rp 14.493.508.536

Tabel 5 Alokasi Anggaran Dalam Rangka Mencapai Indikator Kinerja yang Diharapkan

BAB IV PENUTUP

A. PENCAPAIAN SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN GORONTALO SECARA UMUM

Pada Tahun 2018 skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebesar 96,82, skor tersebut mengalami penurunan 0,26 jika dibandingkan dengan pencapaian skor kinerja Tahun 2017 sebesar 97,08.

B. SEBAB-SEBAB UMUM PERUBAHAN CAPAIAN SKOR

Pencapaian skor yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2017 karena terdapat pencapaian IKU yang tidak memenuhi target yaitu :

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang hanya mencapai 57,26% dibanding target 65%.
2. IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK yang hanya mencapai 3,93 dari target 5,00.
3. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang hanya mencapai 4,28 dari target 5,00.
4. IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja yang hanya diberikan skor BB sedangkan yang ditargetkan adalah mendapat skor A.
5. IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi yang mendapat skor 79,10%, lebih rendah dari target 80%.
6. IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa yang hanya mencapai 95,83% dibanding target 100%.
7. IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) yang hanya mencapai 75% dibanding target 100%.
8. IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran yang hanya mencapai 80,38% dari target sebesar 85%.

C. KENDALA/HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN IKU TAHUN 2018

Kendala/hambatan dalam pencapaian IKU Tahun 2017 dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. **Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan pada IKU 1.1 (Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan),** Tidak tercapainya target IKU 1.1 terjadi karena :
 - a. Entitas belum melakukan kajian yang meliputi antara lain adanya perubahan organisasi pemerintah daerah sehingga rekomendasi yang bersifat administratif tidak bisa ditindaklanjuti lagi (SKPD sudah dihapus atau berubah).
 - b. Para pejabat terkait pindah tugas/pensiun/meninggal, dan entitas belum mengajukan status 1 (selesai) dan status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah).
 - c. Tindak lanjut atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dilakukan secara angsuran dimana dalam 1 temuan terdapat beberapa penanggungjawab sehingga proses penyelesaiannya berlarut-larut.
 - d. Kepala Daerah/Sekretaris Daerah belum optimal berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah/SOPD/BUMD terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
 - e. Belum adanya mekanisme pelaporan pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kepada instansi yang berwenang, sehingga belum ada sanksi yang dikenakan kepada pejabat dimaksud.
2. **Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan** pada IK 3.1.1 dan IK 3.1.2 belum tercapai karena ini merupakan IK baru yang masih memerlukan sosialisasi dan pendampingan untuk diisi.
3. **Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan** untuk IK 3.2.1 tidak dapat tercapai karena adanya standar baru yang ditetapkan oleh Itama. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berupaya memperbaiki pelaporan agar dapat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Itama. Untuk IK 3.2.2, selama Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memanfaatkan seluruh aplikasi teknologi dan Informasi. Namun belum seluruh pegawai memanfaatkan TI dimaksud secara optimal

karena kualitas jaringan internet di Provinsi Gorontalo yang belum begitu baik, terutama di daerah-daerah tertentu yang tidak mendapat akses sama sekali.

4. **Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan** pada IK 3.3.1 (Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa) dan IK 3.3.2 (Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)). Pencapaian IK 3.3.1 ini sebesar 95,83% dan tidak dapat tercapai sesuai dengan target sebesar 100%, sedangkan untuk IK 3.3.2 hanya tercapai sebesar 75% dan tidak dapat tercapai sesuai dengan target sebesar 100% karena kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang yang padat sehingga para pemeriksa dan pegawai penunjang tidak memiliki waktu untuk mengikuti Diklat. Selain itu, terdapat jadwal diklat yang waktunya bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan di perwakilan dan ada pegawai dengan jabatan Ketua Tim Yunior yang justru sering diundang mengajar Diklat sehingga tidak sempat mengikuti Diklat sebagai peserta pada Tahun 2018.
5. **Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo** pada IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran yang hanya mencapai 80,38% karena masih belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran serta belum maksimalnya efisiensi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

D. STRATEGI DAN RENCANA AKSI DALAM PEMENUHAN TARGET TAHUN 2018

Strategi dan rencana aksi dalam pemenuhan target Tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Lebih mengintensifkan pertemuan dengan Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten untuk melakukan rekonsiliasi data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan mendorong penyelesaian kendala/hambatan untuk meningkatkan persentase TLRHP.
2. Mensosialisasikan dan mengasistensi pegawai ketika melaksanakan survei dari pihak ketiga terkait pemahaman serta implementasi visi, misi dan nilai dasar BPK.
3. Mengupayakan peningkatan kualitas pelaporan hasil kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

4. Memonitor pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan menginstruksikan pemanfaatan TI kepada seluruh pegawai.
5. Berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Balai Diklat agar mengatur jadwal kegiatan diklat tidak bersamaan dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan sehingga para pemeriksa dan para pegawai penunjang dapat mengikuti diklat. Selain itu, akan menyelenggarakan diklat bagi para pemeriksa dan pegawai penunjang di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
6. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan sehingga BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tidak hanya mampu menyerap anggaran yang diterima namun juga bisa terus melaksanakan pengelolaan anggaran secara lebih efisien dan optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**